

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penanaman Nilai

1. Pengertian Penanaman Nilai

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “penanaman” merupakan perbuatan, tata cara, atau proses menanam, memelihara, atau menanamkan. Penanaman yang dimaksud merupakan suatu cara atau proses untuk menanamkan suatu perbuatan sehingga apa yang diinginkan untuk ditanamkan akan tumbuh dalam diri seseorang.

Kata nilai berasal dari bahasa latin *vale 're* yang berarti bermanfaat, mampu, berdaya, berlaku, sehingga nilai digambarkan sebagai sesuatu yang dianggap baik, berguna, dan paling benar sesuai dengan pendapat seseorang atau sekelompok orang.²⁰ Nilai tersebut berarti sesuatu yang berguna dan dipandang baik, baik itu menurut pandangan seseorang maupun berdasarkan sekelompok orang.

Menurut Linda dan Richard Eyre (dalam Susilo), Nilai adalah standar perilaku dan sikap yang menentukan identitas kita, cara hidup, dan cara kita memperlakukan orang lain dengan lebih baik.²¹ Cara lain untuk memahami nilai adalah sebagai sesuatu yang memberi manfaat atau mempunyai tujuan bagi orang lain, dan tujuan atau manfaat itu terkait dengan perbuatan atau sikap baik seseorang.

²⁰ Sutarjo Susilo, *Pembelajaran Nilai-Nilai Karakter*, (jakarta: Rajawali Press, 2013), 56.

²¹ Sutarjo Susilo, *Pembelajaran Nilai-Nilai Karakter*, 57.

Nilai adalah instrumen yang menggambarkan alasan mendasar mengapa suatu tindakan atau keadaan akhir tertentu lebih diinginkan secara sosial dibandingkan tindakan atau keadaan akhir yang berbeda. Nilai merupakan komponen pertimbangan yang mengungkapkan keyakinan seseorang tentang apa yang baik, diinginkan, atau benar. Milton Rokeach dan James Bank mendefinisikan nilai sebagai sejenis keyakinan yang termasuk dalam sistem kepercayaan dan berkaitan dengan tindakan atau ketiadaan tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan seseorang sehubungan dengan apapun.²²

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai yang dianggap memberikan identitas yang memberikan pola tertentu pada pola berpikir, perasaan, keterikatan, dan perilaku seseorang ditanamkan melalui proses, metode, atau tindakan yang disebut dengan penanaman nilai.

B. Moderasi Beragama

1. Pengertian Moderasi Beragama

Moderasi beragama berasal dari kata “moderasi”, yang diambil dari kata “*moderation*” dalam bahasa Inggris, yang berarti ketidakberpihakan, moderasi, dan sikap moderat, berfungsi sebagai landasan konseptual bagi moderasi beragama.²³ Sedangkan kata “moderasi” berasal dari kata “moderat” yang berada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memiliki arti selalu pantang melakukan perbuatan

²² Chabib Toha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 60.

²³ Azis, Dkk, *Pedoman Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam, 2019), 3.

atau ungkapan berlebihan, condong pada dimensi atau pendekatan yang menengah, dan terbuka mempertimbangkan pendapat orang lain.

Sementara itu, dalam terminologi Islam mengenal istilah “*wasathiyyah*” yang digunakan dalam bahasa Islam dan berasal dari bahasa Arab yang berarti mengamalkan sikap secukupnya. Dalam konteks ini, *wasathiyyah* mengacu pada kesetaraan, sentralitas, dan keselarasan antara dua sudut pandang yang tidak bertentangan. Bagi orang yang menerapkan prinsip *wasathiyyah* disebut dengan istilah *wasith*, dan diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata wasit. Kata “wasit” mempunyai tiga makna, yaitu penengah, perantara (misalnya dalam perdagangan dan bisnis), penengah (yang memisahkan atau mendamaikan) antara yang berselisih, dan pemimpin dalam suatu pertandingan.²⁴

Dalam bahasa Arab, *Wasathiyyah* diartikan sebagai “pilihan terbaik”. Kata apapun yang digunakan mempunyai arti yang sama yaitu, "adil" yang dalam hal ini mengacu pada pemilihan jalan tengah antara dua atau lebih kemungkinan ekstrem. Sementara itu dalam buku “Moderasi Beragama” yang ditulis oleh Tim Penyusun Kementerian Agama menjelaskan makna kata *wasath* diartikan sebagai “segala sesuatu yang baik menurut obyeknya”. Misalnya, kata sifat "dermawan" yang berarti menunjukkan sikap yang berada di antara pelit dan boros, atau kata “pemberani” yang memiliki arti sikap di antara antara penakut dan

²⁴ Edy Sutrisno, “Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan”, *Jurnal Bimas Islam*: 12(1), 2019, 324.

ceroboh. Dan masih banyak lagi contoh kata dalam bahasa Arab yang seperti itu.²⁵

Moderasi beragama adalah suatu sikap atau perilaku yang menunjukkan keseimbangan, toleransi, dan pemahaman yang mendalam terhadap agama atau keyakinan agama, serta menghindari ekstremisme, fanatisme, atau intoleransi agama. Sikap moderasi beragama bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai di antara berbagai kelompok agama dan keyakinan.

Secara mendasar moderasi sebenarnya sudah diajarkan oleh Islam yang sudah tergambar dalam Al-Quran. Dalam Al-Qur`an istilah moderasi disebut dengan *Al-Wasathiyyah*, namun juga terdapat perdebatan tentang pemahaman moderasi ditinjau dalam konteks kekinian. Kata *al-wasathiyyah* bersumber dari kata *al-wasith* (dengan huruf sin yang disukunkan) dan *al-wasath* (dengan huruf sin yang di-fathahkan) keduanya merupakan isim mashdar dari kata kerja *wasatha*. Secara sederhana, pengertian *Wasathiyyah* secara terminologis bersumber dari makna-makna secara etimologis yang artinya suatu karakteristik terpuji yang menjaga seseorang dari kecenderungan bersikap ekstrim.

Dari pengertian dasar *wasathiyyah* dalam kamus-kamus bahasa Arab dan juga yang terdapat dalam Al-Qur`an, dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep *wasathiyyah* secara etimologi memiliki dua pengertian besar yaitu: pertama, sebagai kata benda (ism) dengan pola *zharf* yang lebih bersifat konkret, yaitu sebagai perantara atau penghubung antara dua

²⁵ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 16.

hal atau dua kondisi atau antara dua sisi berseberangan. Kedua, lebih bersifat abstrak yang berarti adil, pilihan, utama dan terbaik. Syekh Raghīb al-Ashfahani memberikan makna sebagai titik tengah, tidak terlalu ke kanan (*ifrâth*) dan tidak pula terlalu ke kiri (*tafrîth*), yang mana di dalamnya terdapat kandungan makna kemuliaan, persamaan dan keadilan (*al-adl*).²⁶

Di dalam buku *The Middle Path of Moderation in Islam*, Mohamad Hasyim Kamali memberi penegasan bahwa *moderate* dalam bahasa arab “*wasathiyah*” tidak terlepas dari kata kunci berimbang (*balance*) dan adil (*justice*). Menurut Mohammad Hashim Kamali, keseimbangan (*balance*) dan berlaku adil (*justice*) merupakan prinsip dasar dari moderasi dalam beragama. Seseorang yang beragama tidak boleh memiliki pandangan yang ekstrem bahkan radikal dengan hanya melihat sesuatu hanya dari satu sudut pandang saja melainkan harus bisa mencari titik tengah dari dua sudut pandang tersebut, dengan itu sebagai hubungan antar umat beragama akan tercipta hubungan yang harmonis dan nyaman.²⁷

Menurut ulama Syekh Yusuf Al-Qardhawii, *wasathiyah* disebut juga *at-tawâzun* adalah upaya untuk menjaga keseimbangan antara dua sisi tepi, tepi yang berlawanan atau bertentangan agar yang satu tidak mendominasi dan menekan yang lain. Sebagai contoh dua ideologi yang bertolak belakang, seperti materialisme dan spiritualisme, individualisme dan sosialisme, atau sudut pandang praktis dan idealis. Menyikapi hal

²⁶ Raghīb al-Ashfahani, *Mufradat Alfazh Al-Quran*, (Beirut: Dar Al-Qalam, 1992), 513.

²⁷ Harin Hiqmatunnisa dan Ashif Az-Zafi, “Penerapan Nilai-nilai Moderasi Islam dalam Pembelajaran Fiqih di PTKIN menggunakan Konsep Problem Based Learn”, *Jurnal JIPIS*, Vol.29, No. 1, April 2020, 29.

tersebut dapat dilakukan dengan cara yaitu melakukan keseimbangan dengan memberikan bagian yang adil dan proporsional kepada masing-masing pihak tanpa berlebihan dan memberi terlalu banyak atau terlalu sedikit.²⁸

Wasathiyyah adalah keseimbangan antara hidup ukhrawi dan duniawi, ruh dan jasad, *aql* dan *naql*, individu dan masyarakat, ide dan realitas, agama dan negara, lama dan baru, agama dan ilmu, modernitas dan tradisi, yang disertai dengan prinsip “tidak berkekurangan dan berkelebihan”.²⁹ Kata *wasath* disebutkan beberapa kali dalam Al-Qur’an dan semuanya memiliki arti tengah-tengah atau berada di antara dua ujung.³⁰ Sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ

عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ

مَنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا

كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi

²⁸ Qardhawi, *Al Khasais al-Ammah li al-Islam*, (Beirut: al-Muassasah al-Risalah, 1983), 127.

²⁹ M. Quraish Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*, (Tangerang: Lentera Hati, 2019), 43.

³⁰ M. Quraish Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*, 4.

atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.” (Q.S. Al-Baqarah: 143)³¹

Ayat tersebut menjadikan status *wasath* berada di tempat yang tinggi. Orang yang berada dalam posisi seperti itu mempunyai pandangan terbaik terhadap orang yang berada di bawah, dan dia juga dapat dilihat oleh orang yang berada di bawah. Ali Jumu'ah menggunakan contoh seseorang di atas bukit untuk menggambarkan situasi ini. Jika jarak puncak gunung dengan lembah lain di belakang gunung kira-kira sama dengan jarak lembah ke puncak gunung, maka orang yang berada di atas gunung tersebut juga dapat dikatakan dalam posisi *wasath*, yaitu di tengah gunung.

2. Indikator Moderasi Beragama

Di dalam moderasi beragama sendiri, tentunya jika ingin menerapkan atau bisa dikatakan sudah menerapkan sikap moderat dalam beragama, ada 4 indikator yang harus diperhatikan, yaitu nilai toleransi, anti kekerasan, komitmen kebangsaan, dan akomodatif terhadap budaya lokal.

a. Toleransi

Untuk menerima perbedaan sebagai fakta alam (*sunnatullah*) dan menghormati serta menghargainya, toleransi menekankan pentingnya paradigma dan pola pikir terbuka. Oleh karena itu,

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2017). 61.

toleransi merupakan komponen penting dalam terwujudnya tatanan sosial demokratis di Indonesia. Sebab, sistem demokrasi hanya bisa terlaksana bila individu atau kelompok bisa saling bertoleransi satu sama lain. Dengan kata lain, semakin kuat toleransi terhadap perbedaan dalam suatu negara (bangsa), maka akan semakin demokratis. Dan juga sebaliknya.³²

Indikator moderasi beragama di Indonesia terlihat dari toleransi antar agama dan toleransi dari dalam agama itu sendiri, baik dari aspek kehidupan sosial maupun politik. Pengembangan pola pikir dan perilaku sosial yang dilandasi semangat toleransi beragama merupakan salah satu cara untuk menunjukkan pentingnya pendidikan toleransi. Oleh karena itu diharapkan sikap saling berdiskusi dan berkolaborasi antar umat beragama, yang berbeda agama dapat diwujudkan dalam konteks kehidupan bermasyarakat melalui sikap toleransi dalam pergaulan satu sama lain. Sementara itu, toleransi antar umat beragama diharapkan mampu menyikapi secara cerdas aliran-aliran minoritas dalam suatu kelompok agama yang dianggap menyimpang dari mayoritas (besar).³³

Dalam perspektif paradigma Ilmu Sosial Profetik (ISP), upaya memahami nilai-nilai sosial profetik Islam sebagai nilai transendensi (iman) dapat menjadi landasan nilai pendidikan toleransi antar umat beragama maupun intra umat beragama. Dalam sikap sosial

³² Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 44.

³³ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 45.

keagamaan, transendensi menonjolkan sikap keimanan. Ajaran Islam yang dapat diobjektifikasi dalam konteks masyarakat majemuk dapat dirujuk dalam pengertian ini sebagai dimensi nilai-nilai transenden dalam pendidikan toleransi. Nilai pendidikan toleransi dapat ditemukan dalam berbagai landasan normatif teologis Islam seperti dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

Terjemahnya:

“Tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Sungguh telah jelas antara kebenaran dan kesesatan).”³⁴

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ajaran Islam menghormati hak hidup agama-agama lain dan memberikan ruang bagi mereka untuk menjalankan keyakinannya.³⁵ Hal ini juga terlihat dalam sejarah hidup Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya dari sifat keterbukaan yang terpuji terhadap non-muslim dan sesama muslim yang diteladani oleh Nabi, para sahabat, dan keturunan setelahnya. Pelayanan Nabi Muhammad SAW kepada kelompok minoritas kafir dzimmi yang hidup di bawah pemerintahan Islam, menjadi contoh keterbukaan dan kasih sayang beliau terhadap non-muslim. Mengenai hal ini, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda:

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 116.

³⁵ Ghazali, “Toleransi Beragama dan Kerukunan dalam Perspektif Islam”, *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 1(1), 2016, 36.

“Ketahuilah, orang yang menzalimi dzimmi atau mengurangi hak-haknya atau membebankan pekerjaan diluar kesanggupannya atau mengambil sesuatu darinya tanpa kerelaannya, maka aku akan menjadi lawannya pada hari kiamat”. (HR. Abu Daud)³⁶

Untuk mewujudkan sikap moderasi beragama di Indonesia, nilai-nilai pendidikan hendaknya dapat mengambil komponen nilai transendensi dari nilai pendidikan toleransi di atas. Selain itu, bukti empiris menunjukkan bahwa Indonesia adalah rumah bagi sejumlah agama yang diakui secara resmi, termasuk Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Oleh karena itu, memahami sikap umat Islam di Indonesia sangat penting untuk menumbuhkan toleransi terhadap keberadaan agama non-Islam.³⁷ Oleh karena itu, mengakui dan menghormati kebebasan setiap agama untuk menjalankan agamanya secara bebas dan tanpa tekanan atau intimidasi dari luar merupakan salah satu cara untuk menunjukkan pentingnya pendidikan toleransi.

b. Anti Kekerasan

Indikator ini mempunyai tujuan untuk melihat dan mengetahui sejauh manakah seseorang dalam melakukan ekspresi keyakinan dan paham terhadap agama dengan damai dan selalu berfikir positif, sehingga tidak menimbulkan kekerasan secara pikiran, fisik, ataupun verbal yang menjadi latar belakang terjadinya radikalisme

³⁶ M. Jakfar, “Perspektif Al-Quran dan Sunnah tentang Toleransi.” *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 18, 2016, 60-61.

³⁷ Wandani, dan Dewi, “Penerapan Pancasila Sebagai Dasar Kehidupan Bermasyarakat.” *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(2), 2021, 36.

(kekerasan).³⁸ Pada umumnya, gerakan radikal menginginkan perubahan segera, meskipun hal tersebut berarti melawan struktur sosial yang saat ini ada di suatu negara (atau wilayah). Terorisme adalah persamaan umum lainnya dengan radikalisme ini. Hal ini agar kelompok radikal dapat mencapai tujuannya dengan berbagai cara, termasuk dengan melakukan intimidasi kepada pihak-pihak yang tidak sependapat dengan mereka. Selain itu, penting untuk menyadari bahwa radikalisme dapat muncul di agama apapun dan tidak hanya di kalangan atau sekte agama tertentu.³⁹

Beberapa sub-indikator yang mendukung anti kekerasan sebagai tanda moderasi beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diantaranya: (1) selalu menjaga lisan dari kata-kata bohong, kotor, atau keji yang dapat melukai perasaan orang lain, baik yang seagama dengan kita maupun yang berbeda agama; (2) tidak bersikap kasar, angkuh, diskriminatif, tidak toleran, menghina, atau melecehkan orang lain, baik yang satu agama dengan kita maupun yang berbeda agama; (3) menahan diri untuk tidak membuat kesal dan menghalangi orang lain, baik yang satu agama, berbeda agama, atau berbeda pendapat atau aliran pemikiran; (4) menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yang dapat mengintimidasi atau mengancam orang lain, baik yang satu agama, berbeda agama, atau

³⁸ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 45.

³⁹ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 46.

berbeda aliran pemikiran; dan (5) menahan diri untuk tidak menggunakan kekuatan fisik untuk menyelesaikan perselisihan.

c. Komitmen Kebangsaan

Tujuan kebangsaan yaitu selalu menjamin bahwa amalan keagamaan masyarakat tidak bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan tujuan yang digariskan dalam UUD 1945 dan Pancasila. Menjaga moderasi beragama berpedoman pada Pancasila sebagai dasar negara yang tercantum pada sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pernyataan ini menyatakan komitmen bangsa dalam menjunjung tinggi keberagaman agama. Untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang merasa dikucilkan atau diabaikan, masyarakat harus menumbuhkan budaya menghormati satu sama lain dan terhadap keyakinan orang lain.

Kebangsaan selalu memiliki komitmen, dimana bertujuan untuk mengetahui dan melihat praktik agama orang tidak mengalami pertentangan sehingga sama dengan nilai yang ada di UUD 1945 dan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara menjadi panduan dalam menjunjung tinggi moderasi beragama. Sila pertama yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa", mencerminkan komitmen kebangsaan untuk menghargai keberagaman agama dan kepercayaan. Masyarakat perlu membangun sikap saling menghormati dan menghargai keyakinan orang lain, sehingga tidak ada pihak yang merasa dianaktirikan atau dikesampingkan.

Dalam kerangka moderasi beragama, komitmen kebangsaan mencakup inisiatif untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan berbagai agama dan kepercayaan tumbuh subur dan hidup berdampingan secara harmonis. Misalnya, salah satu strategi untuk menanamkan gagasan moderasi beragama pada usia muda adalah melalui pendidikan tentang kebangsaan. Pendidikan mengajarkan generasi penerus untuk hidup rukun antar umat beragama dan saling menghargai keberagaman.

Perayaan hari raya keagamaan, seperti Natal, Idul Fitri, Waisak, dan Nyepi, memberikan contoh spesifik bagaimana moderasi beragama menunjukkan dedikasi suatu bangsa. Untuk menunjukkan sikap yang saling berhubungan erat dan rasa kebersamaan, pemerintah dan masyarakat biasanya bekerja sama merencanakan dan berpartisipasi dalam acara lintas agama. Hal ini yang dapat memupuk rasa persatuan dan membuat negara merasa bangga dengan keberagamannya.

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya komitmen kebangsaan dan pentingnya pendidikan dalam menumbuhkan pola pikir keagamaan yang moderat merupakan indikator yang signifikan. Dalam hal ini, nilai pendidikan dari komitmen kebangsaan diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kewajiban kewarganegaraan dan agamanya. Dengan kata lain, melaksanakan kewajiban sipil atau

tugas sebagai warga negara merupakan bentuk penerapan prinsip-prinsip agama.⁴⁰

Kegunaan pendidikan dalam menumbuhkan komitmen nasional terhadap moderasi beragama dapat dilihat dalam konteks tinjauan paradigma Ilmu Sosial Profetik (ISP) yang dinilai selaras dengan konsep humanisasi (*amar ma'ruf*). Hal ini disebabkan karena komitmen nasional mencakup makna persatuan dan kesatuan di antara kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang heterogen.⁴¹ Apalagi di era globalisasi saat ini, besar kemungkinan ide-ide atau pemikiran dari luar (internasional) masuk ke Indonesia, baik positif maupun negatif, dan kemungkinan besar akan berbenturan dengan ideologi negara Indonesia atau semangat nilai-nilai kebangsaan. Maka dari itu, pentingnya objektifikasi nilai-nilai pendidikan komitmen kebangsaan dalam aturan keteladanan ini adalah untuk mewujudkan sikap beragama yang moderat guna menjamin setiap warga negara dapat mempertahankan prinsip persatuan dan kesatuan dalam kerangka kehidupan berbangsa.

d. Akomodatif terhadap Budaya Lokal

Kebudayaan lokal mencakup cara hidup, anggapan mendasar dan gagasan yang diakui oleh masyarakat yang tinggal di sana. Hal ini juga mencakup cara berpikir, bertindak, dan menilai sesuatu yang diungkapkan dalam cara yang konkret dan abstrak untuk

⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 43-44.

⁴¹ Adha, dan Susanto, "Kekuatan Nilai-Nilai Pancasila dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia". *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, 15(1), 2020, 136.

memungkinkan adanya fleksibilitas. Konvensi, tradisi, etika, dan aturan perilaku seseorang, beserta sikap dan keyakinannya, semuanya dianggap sebagai bagian dari budaya.⁴² Beberapa orang menyebut ekspresi nyata dari identitas suatu suku, yaitu seperti pakaian tradisional, musik, dan tarian, sebagai “budaya material” mereka.⁴³ Jadi bisa dikatakan bahwasanya budaya merupakan perilaku, cara hidup, dan sikap masyarakat yang digunakan sebagai sarana untuk mengekspresikan kepada dunia. Misal melalui musik, tarian, pakaian adat mereka, dan lain-lain.

Kemudian, selama tidak bertentangan dengan inti ajaran agama, maka perilaku dan praktik keagamaan yang akomodatif terhadap budaya lokal dapat dipandang sebagai sikap menerima adat dan budaya yang membentuk kearifan lokal masyarakat.⁴⁴ Penting untuk memperhatikan bagaimana budaya lokal diadaptasi untuk memahami pengaruhnya terhadap sikap, perilaku, dan tindakan. Keterbukaan seseorang untuk menerima berbagai kearifan lokal sebagai bagian dari hukum alam dan kesetiiaannya pada konsensus dasar nasional merupakan dua faktor yang menentukan seberapa religius seseorang.

Sikap akomodatif terhadap budaya lokal juga mencerminkan nilai humanisasi. Sebab, sikap akomodatif terhadap budaya lokal

⁴² Yulianus, Devung, dan Samdirgawijaya, “Tradisi Penyembuhan Orang Sakit Melalui Upacara Belian dan Perbandingannya dengan Sakramen Pengurapan Orang Sakit”, *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral*, 5(1), 2021 34–51.

⁴³ Huvang, dan Devung, “Makna Tanah Menurut Suku Dayak Bahau Busaang dan Teologi Lingkungan”, *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral*, 4(1), 2020 14–26.

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 66.

dapat membantu membentuk karakter seseorang agar dapat menganut berbagai praktik keagamaan yang akomodatif dan sama dengan budaya (tradisi) lokal di Indonesia. Dalam situasi seperti ini, pendidikan yang peka terhadap budaya sangat diharapkan agar dapat menanamkan pola pikir dan sikap beragama yang moderat pada masyarakat sehingga memungkinkan mereka menyikapi adat istiadat dengan ramah dalam membentuk perilaku keagamaan, asalkan adat istiadat tersebut tidak menyimpang dari prinsip inti agama pilihan mereka.⁴⁵

Jika melihat berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwasanya indikator moderasi beragama baik komitmen kebangsaan dan juga akomodatif terhadap budaya lokal, keduanya memiliki titik temu dan saling berhubungan yang dapat mencerminkan nilai humanisasi (*amar ma'ruf*).

3. Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama

Moderasi beragama yaitu menyikapi peristiwa atau mengamati kenyataan secara seimbang sesuai dengan ajaran agama, serta menyikapi berbagai persoalan keagamaan yang ada di masyarakat dengan menumbuhkan sikap saling membantu, menghormati, toleransi, dan menjalin hubungan baik, baik mereka yang berbeda agama, berbeda budaya, suku, dan lain sebagainya, faktor-faktor tersebut tidak mengurangi pentingnya menghargai orang lain demi menjaga perdamaian dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjalani

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 46-47.

kehidupan Islam yang moderat, seseorang harus memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip moderasi beragama sebagai berikut:⁴⁶

a. Prinsip *Tawasut*

Tawasut merupakan pengetahuan atau kegiatan keagamaan yang bukan merupakan *tafrith* (pengurangan keyakinan agama) maupun *ifrith* (agama yang ekstrem). Berada di tengah-tengah antara dua sudut pandang ekstrem yaitu, tidak terlalu kiri (sosialisme) dan tidak terlalu kanan (fundamentalis) adalah apa yang diwakili oleh *tawasut* (liberal). Islam bisa diterima oleh semua orang karena sifatnya yang tengah jalan atau *tawasut*, baik dalam masyarakat maupun secara global. Hal ini merupakan suatu anugerah yang diberikan Allah SWT kepada makhluknya.⁴⁷

b. Prinsip *Tawazun*

Tawazun adalah gagasan dan cara hidup keagamaan yang menyeluruh yang membahas semua aspek kehidupan, baik keagamaan maupun duniawi, dan menetapkan kriteria untuk membedakan antara *ikhtilf* (kebenaran) dan *inhirf* (penyimpangan). *Tawazun* juga berarti "memberikan sesuatu dengan haknya sendiri, tanpa penambahan atau pengurangan".

c. Prinsip *I'tidl* (Benar dan Tegas)

I'tidl adalah istilah linguistik yang berarti "menempatkan sesuatu pada posisinya", "melaksanakan hak dan melaksanakan

⁴⁶ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 70.

⁴⁷ Wan Kamal Mujani, Ermy Azziaty Rozali, dan Nor Jamaniah Zakaria, "The Wasatiyyah (Moderation) Concept: Its Implementation In Malaysia", *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 1 Juli 2015.

kewajiban dengan tepat", dan "menempatkan sesuatu pada tempatnya". *I'tidl* merupakan komponen keadilan dan etika yang dianut setiap umat Islam. Allah SWT menunjukkan perilaku ihsan untuk menunjukkan bahwa keadilan yang disyariatkan Islam harus diterapkan secara tepat, adil, dan merata dalam segala bidang kehidupan.

d. Prinsip *Tasamuh*

Tasamuh disebut juga dengan toleransi. Istilah *tasamuh* berasal dari versi asli kata *samah*, *samahah*, yang memiliki arti kedermawanan, pengampunan, kemudahan, dan kedamaian dalam kamus bahasa Arab. *Tasamuh* adalah istilah etimologis yang berarti menerima sesuatu dengan ringan atau menanggungnya. *Tasamuh* dengan kata lain adalah kemampuan menerima atau menoleransi perbedaan dengan hati yang ringan.

e. Prinsip *Musawah* (Egalitarian)

Musawah adalah kata yang berarti "kesetaraan" dalam bahasa Arab. *Musawah* adalah gagasan konsep bahwa setiap orang diciptakan setara dan harus diperlakukan dengan hormat. Semua orang berhak atas nilai-nilai dan rasa hormat yang sama, tanpa memandang jenis kelamin, warna kulit, atau asal etnis mereka.

f. Prinsip *Syura* (Musyawarah)

Syura adalah istilah Persia yang berarti menjelaskan, mengatakan menyarankan, menerima diskusi, yakni proses saling bertukar pendapat dalam menyelesaikan masalah dalam kedamaian

dan ketentraman, juga tawar-menawar tentang suatu topik dari berbagai perspektif untuk mewujudkan ketidaksalahpahaman terhadap sesuatu.

4. Ciri-Ciri Moderasi Beragama

Menurut terminologi Al-Qur'an, khususnya dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 143, Umat Islam merupakan "*Ummatan Wasathon*", yaitu umat yang secara istimewa dijadikan oleh Allah SWT paling baik dan paling bagus, karena kemampuannya dalam mengimplementasikan karakter manusia yang adil sehingga dapat menjadi saksi terhadap perbuatan orang-orang yang menyimpang dan perbuatan orang-orang mengikuti jalan kebenaran. Menurut referensi ayat Al-Qur'an tersebut, umat Islam akan dapat menjadi umat terbaik manakala mampu menampilkan ciri-ciri yaitu adil dan dapat berperan sebagai saksi yang adil dalam membedakan perbuatan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dan orang-orang yang berada di jalan yang benar.⁴⁸

Menurut Azyumardi Azra, "*Ummatan Wasathon*" sebagaimana yang disebut dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 143, yang kemudian diterjemahkan secara bahasa menjadi beberapa istilah seperti "Islam Moderat", "*Islam Wasathiyyah*" dan juga "Moderasi dalam Islam". Istilah tersebut selanjutnya dijadikan sebagai terminologi bagi kajian yang membahas jalan tengah dalam Islam berdasarkan proyeksi Al-Qur'an yang menyangkut identitas diri dan pandangan dunia komunitas muslim untuk

⁴⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan Juz 2*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2006), 36.

menghasilkan kebajikan yang membantu terciptanya harmonisasi sosial dan keseimbangan dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat maupun hubungan antar manusia yang lebih luas. Berdasarkan pendapat Azyumardi Azra tersebut, muslim moderat memiliki ciri-ciri yaitu: ⁴⁹

- a. Memiliki identitas diri dan pandangan dunia yang didasarkan pada proyeksi Al-Qur'an.
- b. Menghasilkan kebajikan dengan mengambil jalan tengah dari pemahaman Islam.
- c. Membantu menciptakan harmonisasi sosial dan keseimbangan dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat maupun hubungan antar manusia yang lain.

5. Bentuk-Bentuk Moderasi Beragama

Bentuk-bentuk moderasi beragama ini menekankan pada sikap, maka bentuk-bentuk moderasi beragama diantaranya seperti, mengakui adanya pihak lain, menghormati pendapat orang lain, memiliki sikap toleransi baik itu dari toleransi suku, ras, budaya dan juga keyakinan, tidak memaksakan kehendak dengan cara kekerasan. Berikut adalah beberapa bentuk moderasi beragama yang umum ditemui:

a. Dialog antaragama

Terlibat dalam diskusi dan dialog terbuka dengan penganut agama lain untuk saling memahami dan membangun jembatan komunikasi.

⁴⁹ Azyumardi Azra, *Moderasi Islam di Indonesia dari Ajaran, Ibadah, hingga Perilaku*, (Jakarta: Kencana, 2020), 1-2.

b. Interaksi sosial positif

Terlibat dalam kegiatan sosial bersama dengan orang-orang dari berbagai keyakinan agama untuk memperkuat hubungan antar komunitas.

c. Pelaksanaan agama dengan keterbukaan

Menjalankan praktik-praktik keagamaan dengan keterbukaan terhadap interpretasi yang beragam dan tanpa menekankan superioritas satu keyakinan atas yang lain.

d. Pendidikan agama moderat

Mendorong pendidikan agama yang lebih moderat, inklusif, dan mengajarkan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati.

e. Menghindari ekstremisme

Menolak sikap dan tindakan ekstremisme atau fanatisme beragama, serta menentang segala bentuk kekerasan yang dilakukan atas nama agama.

f. Toleransi terhadap perbedaan ritual keagamaan

Menghargai perbedaan dalam ritual keagamaan dan praktik ibadah tanpa menghakimi atau menilai.

g. Penghargaan terhadap budaya dan tradisi lain

Mengakui dan menghargai kekayaan budaya dan tradisi dari berbagai komunitas agama.

h. Keterlibatan dalam proyek kemanusiaan bersama

Terlibat dalam proyek-proyek kemanusiaan dan kerjasama lintas agama untuk mengatasi masalah sosial bersama.

i. Menolak diskriminasi dan intoleransi

Mengambil sikap tegas menentang diskriminasi agama dan intoleransi, serta memperjuangkan hak asasi manusia untuk semua.

j. Penggunaan bahasa damai

Menggunakan bahasa yang damai dan menghindari retorika yang merendahkan atau memprovokasi terhadap kelompok agama lain.

k. Pertemanan lintas agama

Membangun hubungan persahabatan dengan orang-orang dari berbagai keyakinan agama untuk memperdalam pemahaman dan mengurangi pemikiran negatif.

l. Penggunaan media sosial yang bertanggung jawab

Menggunakan media sosial dengan bertanggung jawab dan menyebarkan informasi yang mempromosikan toleransi dan pengertian antaragama.

C. Pembelajaran

1. Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran adalah sub bagian dari pendidikan dan merupakan proses di mana lingkungan seseorang dengan sengaja dikelola agar memungkinkan orang itu dapat belajar melakukan hal tertentu dalam kondisi tertentu atau memberikan respon terhadap hal tertentu. Di sisi lain dinyatakan bahwa pembelajaran adalah suatu aktivitas gabungan yang melibatkan guru, peserta didik dan mata pelajaran dalam suatu interaksi yang dinamis. Interaksi yang dimaksudkan di sini ialah interaksi aktif

antara mental/psikis dengan lingkungannya, sehingga menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan terutama sikap yang bersifat permanen.⁵⁰

Pembelajaran secara luas adalah proses di mana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, pemahaman, atau pengalaman baru melalui interaksi dengan informasi, lingkungan, instruksi, atau pengalaman. Ini mencakup berbagai jenis pembelajaran, baik yang terjadi di dalam kelas formal, di luar lingkungan pendidikan formal, atau bahkan secara mandiri.

Definisi pembelajaran menurut Sadiman yaitu dapat dipahami sebagai suatu proses interaksi antara guru, peserta didik, dan lingkungan pembelajaran yang bertujuan untuk mencapai perubahan tingkah laku peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Dalam perspektif ini, pembelajaran bukan hanya sekedar mentransfer informasi dari guru ke peserta didik, tetapi juga melibatkan proses aktif peserta didik dalam mengonstruksi pengetahuan dan keterampilan baru.⁵¹

2. Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran merupakan bagian penting dari pembelajaran, dalam hal ini tujuan pembelajaran diharapkan harus tercapai oleh peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran yang telah dilakukan. Tujuan pembelajaran adalah kemampuan-kemampuan yang diharapkan dimiliki peserta didik setelah memperoleh pengalaman belajar.

⁵⁰ Agus Pahrudin, *Strategi Belajar Mengajar Pendidikan Agama Islam di Madrasah*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2017), 46.

⁵¹ Arief Sadiman, *Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya*, (Surabaya: Rajawali Press, 2015), 56.

Dengan kata lain, adanya tujuan pembelajaran yang terencana dengan baik dan sebaiknya dicatat secara tertulis agar bisa dikoreksi kembali saat ada kesalahan dalam penerapan rancangan itu dan tidak tercapai tujuan yang diharapkan. Dengan berbagai macam pendapat tentang pengertian tujuan pembelajaran, dapat disimpulkan bahwa dengan kejelasan tujuan pembelajaran, para pengajar dapat menentukan materi ajar yang sesuai, sehingga dapat tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran.⁵²

3. Perencanaan Pembelajaran

Definisi dari perencanaan secara sederhana adalah suatu proses mempersiapkan hal-hal yang akan dikerjakan pada waktu yang akan datang guna mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.⁵³ Oleh karena itu, Hamalik menjelaskan bahwa perencanaan adalah suatu prosedur manajerial yang menetapkan apa yang akan dilakukan dan bagaimana melakukannya. Ini juga menguraikan tujuan yang akan dicapai dan mengembangkan jadwal kerja untuk membantu mencapai tujuan tersebut.⁵⁴

Perencanaan pembelajaran sebagai sebuah proses, disiplin ilmu pengetahuan, realitas, sistem dan teknologi pembelajaran yang bertujuan agar pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien.⁵⁵ Hal ini ditegaskan oleh Combbs bahwa perencanaan pembelajaran adalah

⁵² Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 35.

⁵³ Jusuf Enoch, *Dasar-Dasar Perencanaan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 20.

⁵⁴ Oemar Hamalik, *Perencanaan dan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Mandar Maju, 1991), 45.

⁵⁵ Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran, Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 2010.

suatu penerapan yang rasional dari analisis sistematis proses perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan tujuan para siswa dan masyarakatnya.⁵⁶

Perencanaan pembelajaran merupakan proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu yakni perubahan perilaku serta rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada.⁵⁷

4. Pelaksanaan Pembelajaran

Proses pembelajaran atau tindakan guru menyampaikan ilmu kepada peserta didik disebut dengan pelaksanaan pembelajaran. Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pengajaran dan pembelajaran berlangsung ketika adanya interaksi antara guru dan peserta didik dengan menggunakan sumber belajar pada lingkungan belajar sebagai proses belajar mengajar. Dalam proses pembelajaran Guru mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku di sekolah, dan proses belajar mengajar merupakan interaksi yang memiliki nilai dan tujuan normatif.⁵⁸

Menurut Rusman (2018), pelaksanaan pembelajaran merupakan hasil interaksi dari komponen-komponen yang memiliki fungsi tersendiri

⁵⁶ Phillip Commbbs, *Apakah Perencanaan Pendidikan Itu?*, (Jakarta: Karya Aksara, 2014), 56.

⁵⁷ Wina Sanjaya, *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 76.

⁵⁸ Zagoto, Yarni, dan Dakhi, "Perbedaan Individu dari Gaya Belajarnya serta Implikasinya dalam Pembelajaran", *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 2(2), 2019, 259-265.

dengan maksud agar ketercapaian tujuan pembelajaran dapat dipengaruhi.⁵⁹

5. Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Evaluation*. Wrightstone, dkk. (Djaali & Pudji Muljono, 2007), yang mengemukakan bahwa evaluasi pendidikan adalah penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan peserta didik ke arah tujuan atau nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam kurikulum.⁶⁰

Lebih spesifik, Grondlund dan Linn menggambarkan evaluasi pembelajaran sebagai proses metodis pengumpulan, pemeriksaan, dan evaluasi data untuk memastikan sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai.⁶¹

Dalam rangka kegiatan pembelajaran, evaluasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses sistematis dalam menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Evaluasi pembelajaran diartikan sebagai penentuan kesesuaian antara tampilan peserta didik dengan tujuan pembelajaran. Dalam hal ini yang dievaluasi adalah karakteristik peserta didik dengan menggunakan suatu tolak ukur tertentu. Karakteristik-karakteristik tersebut dalam ruang lingkup kegiatan belajar-mengajar adalah tampilan peserta didik dalam bidang kognitif (pengetahuan dan intelektual), afektif (sikap, minat, dan motivasi), dan psikomotor (keterampilan, gerak, dan tindakan). Tampilan tersebut dapat

⁵⁹ Rusman, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Pranada media Grup, 2018), 89.

⁶⁰ Djaali, dan Pudji Muljono, *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*, (Jakarta: Grafindo, 2018), 76.

⁶¹ Grondlund, *How to Make Achievement Test and Assessment*, (New York: Macmillan Co, 2015), 89.

dievaluasi secara lisan, tertulis, maupun perbuatan. Dengan demikian mengevaluasi di sini adalah menentukan apakah tampilan peserta didik telah sesuai dengan tujuan instruksional yang telah dirumuskan atau belum.

Evaluasi mencakup sejumlah teknik yang tidak bisa diabaikan oleh seorang guru. Evaluasi bukanlah sekumpulan teknik semata-mata, tetapi evaluasi merupakan suatu proses yang berkelanjutan yang mendasari keseluruhan kegiatan pembelajaran yang baik. Evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana efisiensi proses pembelajaran yang dilaksanakan dan efektifitas pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

D. Pendidikan Agama Islam

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan, yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat, untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang. Pendidikan adalah pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal dan non-formal dan informal di sekolah, dan di luar sekolah yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan mengoptimalkan pertimbangan kemampuan-kemampuan individu agar di kemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara tepat. Pendidikan sebagai sebuah bentuk kegiatan manusia dalam kehidupannya juga

menempatkan tujuan sebagai suatu yang hendak dicapai, baik tujuan yang dirumuskan itu bersifat abstrak maupun dibentuk secara khusus untuk memudahkan pencapaian tujuan yang lebih tinggi. Begitu juga dikarenakan pendidikan merupakan bimbingan terhadap perkembangan manusia menuju ke arah cita-cita tertentu, maka yang menjadi masalah pokok bagi pendidikan adalah memilih arah tujuan yang akan dicapai.⁶²

Pendidikan Agama Islam berupaya membekali peserta didik dengan ilmu agama agar mereka belajar beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Sesuai dengan ajaran Islam, bersikap inklusif, wajar, dan filosofis dalam hubungan kerjasama antar umat beragama dalam masyarakat untuk memajukan persatuan nasional.⁶³ Pendidikan Agama Islam adalah tumbuhnya peserta didik dalam melaksanakan kegiatan keislaman sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, serta terbinanya harmonisasi keragaman agama di lingkungan sekolah itu sendiri. Saat ini, pendidikan agama yang mengedepankan nilai wacana menjadi sangat penting. Paradigma pendidikan agama merupakan bagian dari upaya meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Munculnya beragam isu yang bernuansa teologis telah mengakibatkan perkelahian kekerasan dalam interaksi antaragama. Ada beberapa indikator yang secara terang-terangan mencerminkan sinyal pemisahan nasional.

⁶² Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, cet ke-4 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 174.

⁶³ Wahid Aminuddin, dan Rofiq, *Membangun Karakter Melalui Pendidikan Agama Islam*, (Graha Ilmu, 2006)

Bencana ini tidak hanya memakan banyak korban jiwa, tetapi juga merusak ratusan rumah ibadah (baik masjid maupun gereja).⁶⁴

Pendidikan Agama Islam adalah proses pendidikan yang berfokus pada ajaran, nilai-nilai, dan keyakinan dalam agama Islam. Pendidikan agama Islam bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang Islam, mempersiapkan individu untuk menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, serta mempromosikan pengamalan ajaran agama dalam berbagai aspek kehidupan.

2. Tujuan Pendidikan Agama Islam

Secara definitif dapat dijelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah perubahan yang diinginkan, yang diusahakan oleh proses pendidikan atau usaha pendidikan untuk mencapainya, baik pada tingkah laku individu dan pada kehidupan pribadinya atau pada kehidupan masyarakat dan pada alam sekitar.⁶⁵ Menurut Muhammad Fadhil Al-Jamali yang dikutip Abudin Nata merumuskan tujuan pendidikan Islam dengan empat macam, yaitu:⁶⁶

- a. Mengenalkan manusia akan perannya di antara sesama makhluk dan tanggung jawabnya dalam hidup.
- b. Mengenalkan manusia akan interaksi sosial dan tanggung jawabnya dalam tata hidup bermasyarakat.
- c. Mengenalkan manusia akan alam dan mengajak mereka untuk mengetahui hikmah penciptannya.

⁶⁴ Muhammad Muchlis, "Pembelajaran Materi Pendidikan Agama Islam (PAI) Berwawasan Moderat", *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21(1), 2020, 11–20.

⁶⁵ Mahfud Junaidi, *Filsafat Pendidikan Islam: Dasar-Dasar Memahami Hakikat Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 185.

⁶⁶ Abudin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 62.

d. Mengenalkan manusia akan pencipta alam (Allah SWT)

Dalam proses pendidikan, tujuan pendidikan yang paling sederhana adalah memanusiaakan manusia, atau membantu manusia menjadi manusia. Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anak agar dapat menerima setiap perbedaan dan belajar hidup dalam keberagaman, sehingga tidak ada prasangka negatif antar umat beragama.⁶⁷

Dalam pengertian lain, menurut Muzayyin Arifin tujuan pendidikan Islam tidak lain adalah merealisasikan idealitas Islami. Sedang idealitas Islami itu sendiri pada hakikatnya mengandung nilai perilaku manusia yang didasari atau dijiwai oleh iman dan taqwa kepada Allah SWT sebagai sumber kekuasaan mutlak yang harus ditaati. Ketaatan kepada kekuasaan Allah SWT yang mutlak itu mengandung makna penyerahan diri secara total kepada-Nya. Penyerahan diri secara total kepada Allah SWT Yang Maha Esa menjadikan manusia menghambakan diri hanya kepada-Nya semata. Bila manusia telah bersikap menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah SWT berarti telah berada di dalam dimensi kehidupan yang menyejahterakan di dunia dan membahagiakan di akhirat.⁶⁸

⁶⁷ Muhammad Muchlis, "Pembelajaran Materi Pendidikan Agama Islam (PAI) Berwawasan Moderat", *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21(1), 2020, 11–20.

⁶⁸ Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 109.